

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara baik di Negara maju maupun di Negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan yang tinggi (Jamal et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sosial sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Tingginya jumlah pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi akan menyebabkan tingginya beban pembangunan yang berkaitan dengan papan, sandang dan pangan. Hal ini dapat di control dalam pelaksanaan KB (Purwanti, 2021)

Keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu langkah untuk mengatur kelahiran adalah dengan penggunaan kontrasepsi (Witono & Parwodiwiyo, 2020).

Pada masa pandemi ini menimbulkan beberapa dampak khususnya bagi Program Keluarga Berencana (KB) yaitu : penurunan peserta KB karena keterbatasan akses layanan dan perubahan ganti pola, penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan, dan penurunan mekanisme operasional di lini lapangan termasuk kampung KB ( Witono & Parwodiwiyono, 2020).

Pada Pasangan Usia Subur (PUS) ini, tentunya menjadi perhatian khusus sebagai dampak adanya pandemi ini, terdapat angka *drop-out* yang meningkat dan maka supply kontrasepsi terdapat angka penurunan yang signifikan (Aqmal, 2020). Masyarakat menjadi khawatir untuk berkunjung ke pelayanan kesehatan seperti klinik kandungan yang tutup sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kontrasepsi. Banyak puskesmas yang memfokuskan pelayanannya pada upaya pencegahan penularan Covid-19 sehingga program pelayanan primer seperti seperti kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana menjadi kurang optimal (Ariyanti, 2021).

Pada masa pandemi Covid-19 terdapat penurunan peserta KB Pada Bulan Maret 2020 apabila dibandingkan Bulan Februari 2020 di seluruh Indonesia. Pemakaian IUD pada Bulan Februari 2020 sejumlah 36.155 turun menjadi 23.380, sedangkan implan dari 81.062 menjadi 51.536, suntik dari 524.989 menjadi 341.109, pil 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW dari 13.571 menjadi 8.093 (Aprillia et al., 2020).

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sumatera Utara, dari 2.259.714 PUS tahun 2019, sebanyak 1.572.121 (69,57%) diantaranya merupakan peserta KB

aktif. KB suntik menjadi jenis kontrasepsi terbanyak digunakan yaitu sebesar 31,72%, diikuti Pil sebesar 27,36%, Implan sebesar 16,16%, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) sebesar 8,99%, Kondom sebesar 7,87%. Jenis kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah Metode Operasi Pria (MOP), yaitu sebesar 0,79% (BKKBN,2019).

Masih bersumber BKKBN Provinsi Sumatera Utara, diperoleh data bahwa dari 317.683 ibu yang bersalin di tahun 2019, terdapat 31.798 ibu yang ber-KB pasca melahirkan (10,01%). Dari jenis kontrasepsi yang digunakan, suntik (30,50%) merupakan jenis kontrasepsi yang terbanyak digunakan, diikuti Pil (28,17%), Implan (16,95%), MOW (10,96%), Kondom (7,98%), AKDR (5,37%) dan MOP (0,07%). Data cakupan peserta KB pasca persalinan menurut jenis kontrasepsi per kabupaten.

Berdasarkan data Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2019 yang bersumber dari BPS Kabupaten Langkat di temukan terdapat 4.296 balita di kecamatan Bahorok dari 10.214 Rumah tangga. Kemudian yang melakukan KB pasca persalinan hanya 11,77 % perkabupaten Langkat berdasarkan data BKKBN Prov. Sumatera Utara Tahun 2019 (BPS Kab. Langkat, 2019).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2020 peserta KB aktif mengalami penurunan jika di bandingkan dengan Tahun 2019 yaitu, IUD 10.648 menjadi 10.003, MOW 8.170 menjadi 6.373, MOP 469 menjadi 422, Kondom 9.772 menjadi 8.126, Implan 23.793 menjadi 15.041, suntikan 41.145 menjadi 39.313, pil 54.209 menjadi 50.736.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kabid KB dan Profil Puskesmas Bukit Lawang jumlah PUS yang menerima KB di Desa Bukit Lawang pada

Tahun 2020 sebanyak 222 dan diantaranya pengguna KB MKJP diperoleh hanya 72 PUS (32,43%) dengan metode yang digunakan yaitu, IUD sebanyak 52 PUS (0,9%), Implan sebanyak 69 PUS (31,08%), MOW Sebanyak 1 PUS (0,45%). Pada Tahun 2021 jumlah PUS penerima KB adalah sebanyak 276 PUS dan diperoleh hanya 45 PUS (16,3%) yang menerima KB MKJP diantaranya menggunakan Metode IUD sebanyak 8 PUS (2,8%), Implan sebanyak 20 PUS (7,24%), MOP sebanyak 6 PUS (2,17%), dan MOW sebanyak 1 PUS (0,36%). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan MKJP yang dinilai sangat efektif untuk menekan angka kelahiran masih sangat rendah.

Rendahnya cakupan akseptor KB MKJP dapat ditelusik dari beberapa faktor. Penelitian Andreanda Nasution 2018 menyebutkan bahwa faktor sikap dan dukungan suami berhubungan dengan penggunaan akseptor KB MKJP di Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selain itu, penelitian Fitriya Ariyani Lubis 2019 menemukan faktor yang berhubungan dengan penggunaan KB MKJP yaitu faktor dukungan suami di Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sereal.

Hasil survey atau wawancara awal dengan PUS di Desa Bukit Lawang yang saya lakukan terdapat 8 PUS dari 10 PUS tidak melakukan KB MKJP dikarenakan suami yang tidak memberi/ tidak adanya dukungan suami. Kemudian 9 PUS dari 10 PUS tidak melakukan KB MKJP dikarenakan rasa takut yang dialami oleh PUS. PUS yang tidak melakukan KB MKJP adalah PUS yang berusia >28 yang sudah pernah melahirkan. Dan tingkat pendidikan PUS yang diwawancara yaitu 4 lulus SMP, 5 lulus SMA, dan 1 PUS starata 1

atau sarjana. Dan 9 dari 10 PUS tidak mengetahui apa apa saja KB MKJP dan apa kelebihan dan kekurangan dari KB MKJP.

Berdasarkan data BKKBN Tahun 2021 angka prevalensi penggunaan Kontrasepsi MKJP berada pada 57,9%, angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 61,78%. Sedangkan data yang diperoleh dari Puskesmas Bukit Lawang menyatakan bahwa pada Tahun 2021 hanya 16,3 % PUS yang melakukan KB MKJP di Desa Buit Lawang yang masih sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh BKKBN.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bukit Lawang Kabupaten Langkat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Bagi PUS Di Desa Bukit Lawang”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Bagi PUS Di Desa Bukit Lawang.

### **1.3.1 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui hubungan pengetahuan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.

- 2) Mengetahui hubungan sikap dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.
- 3) Mengetahui hubungan umur dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.
- 4) Mengetahui hubungan pendidikan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.
- 5) Mengetahui hubungan paritas dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.
- 6) Mengetahui hubungan dukungan pasangan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di desa Bukit Lawang.
- 7) Mengetahui hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di desa Bukit Lawang.
- 8) Mengetahui hubungan budaya dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS di Desa Bukit Lawang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Desa Bukit Lawang**

Sebagai masukan bagi petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan KB terutama pada PUS yang tidak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

##### **1.4.2 Bagi PUS**

Agar para PUS atau responden lebih memahami dan mengerti mengenai keefektifan dan keuntungan dari KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

### 1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di FKM UINSU Medan, menambah wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam memecahkan masalah kesehatan khususnya dalam bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan.

